

# **PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2008**

Oleh:

**AHMAD FAUZI**

NIM. E02109011

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura  
Pontianak, 2015.

*e-mail:* [Fauzi.achmad80@yahoo.com](mailto:Fauzi.achmad80@yahoo.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini menyoroiti masalah partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008. Dalam pelaksanaan pemilihan tersebut, Kecamatan Pontianak Selatan merupakan salah satu Kecamatan di Kota Pontianak yang memiliki tingkat partisipasi politik terendah dibanding dengan Kecamatan lainnya. Berbagai pendapat menyatakan bahwa salah satu faktor tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang dipengaruhi oleh status sosial ekonominya. Bahkan tidak sedikit para ahli berpendapat bahwa semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat partisipasi politiknya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak antara status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, jenis penelitian yaitu penelitian korelasional yang menentukan hubungan pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 377 responden yang tersebar di 5 Kelurahan yang ada di Kecamatan Pontianak Selatan. Analisis yang digunakan adalah analisa kualitatif dan deskriptif kuantitatif, analisis ini meliputi tabel frekuensi, tabel silang, dan dilanjutkan dengan analisis korelasi *product moment* dengan taraf kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil olah data dalam penelitian ini menyatakan bahwa status sosial ekonomi responden tergolong dalam kategori menengah keatas atau (tinggi). Sedangkan tingkat partisipasi politik responden di Kecamatan Pontianak Selatan tergolong dalam kategori rendah. Jadi kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan menggunakan rumus analisis korelasi *product moment* menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik responden di Kecamatan Pontianak Selatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008.

Kata-kata kunci : Status Sosial Ekonomi, Partisipasi Politik, Masyarakat Pemilih (Pemilih), dan Pemilihan Kepala Daerah

## ABSTRACT

This study highlights the problem of public political participation in the election of the Mayor and Deputy Mayor of Pontianak in 2008. In these elections, District of South Pontianak is one of the sub-district in Pontianak City which has the political participation level of lowest compared with other sub-district. Various opinion states that one of the factors the high low levels of political participation is influenced by socio-economic status. Even some experts argue that the higher a person's socioeconomic status, the higher the level of their political participation. Thesis is intended to know whether there is a significant effect or not between socio-economic status with the people's political participation in the sub-district of South Pontianak.

This research uses quantitative methods, the type of research is correlational studies that determine the relationship of each variable studied. The number of respondents in this study were 377 respondents spread in 5 villages which exists in the sub-district South Pontianak. The analysis used is descriptive qualitative and quantitative analysis, this analysis includes frequency tables, cross tables, and continued with product moment correlation analysis with a confidence level of 95%. Based on the results if the data in this study stated that the socioeconomic status of the respondents belong to the upper middle class or the (high). While the participation rate of the respondents in the District of South Pontianak classified in the low category. So the conclusions of this research is based on the results of statistical calculation using the formula of product moment correlation analysis showed that there was no effect or a significant correlation between socio-economic status of the political participation of respondents in the sub-district of South Pontianak in the election of Mayor and Deputy Mayor of Pontianak in 2008.

*Keywords : Socio-Economic Status, Political Participation, Community Voter (Voters) and Regional Head Election*



## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) langsung pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disertai dengan PP No.6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau yang lebih dikenal dengan pemilukada langsung (Undang-undang otonomi daerah, hal 1 dan 440).

Sistem pemerintahan yang sebelumnya begitu sentralistik, secara perlahan mulai menuju ke arah yang lebih desentralistik. Perubahan pola pemerintahan sentralistik menuju desentralistik yang ditandai adanya konsep otonomi daerah merupakan suatu cara mempermudah proses pengaturan pemerintahan yang ada di daerah

untuk dapat diberdayakan secara maksimal sesuai kehendak daerah yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Jadmika dalam (Waristo, 2003:104) mengemukakan bahwa, "otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar".

Sistem pemilukada langsung lebih menjanjikan dibandingkan sistem yang telah berlaku sebelumnya. Menurut Nurcholis (2009:105) dengan adanya pemilihan kepala daerah diharapkan dapat menunjang tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru yang pro-demokrasi di daerah. Pemilihan Kepala Daerah sendiri merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota. Aktor utama sistem pemilihan kepala daerah adalah rakyat, parpol dan calon kepala daerah. Ketiga aktor tersebut terlibat langsung dalam kegiatan pemilihan kepala daerah.

Di era otonomi daerah peranan masyarakat menjadi sangat penting untuk menentukan masa depan pembangunan daerah. Salah satu tolak ukur untuk mengukur tingkat demokrasi di era otonomi daerah adalah dengan melihat tingkat partisipasi politik masyarakat dalam

pemilihan kepala daerah, karena partisipasi politik masyarakat akan menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Partisipasi politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berlaku. Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai pada reformasi. Pada masa Orde Baru, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu selalu mencapai angka yang tinggi. Persentase jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya selalu berada di atas angka 90 persen. Namun di era reformasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum secara nasional mengalami penurunan. Pemilu tahun 1999 merupakan awal dari penurunan tingkat partisipasi pemilih.

Penurunan tingkat partisipasi politik di era reformasi juga terjadi pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di beberapa daerah misalnya seperti yang terjadi pada Pemilihan Walikota Pontianak tahun 2008 di mana jumlah perolehan suara pada Pemilihan Walikota Pontianak tahun 2008 yang dimenangkan oleh pasangan Sutarmidji-Paryadi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat terbilang cukup rendah yakni dengan jumlah

pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang dihitung dari jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 252,322 atau sebesar 61,46 % dari total jumlah pemilih tetap sebanyak 410.500 pemilih.

Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan pada pemilihan Walikota Pontianak tahun 2008 diduga dipengaruhi oleh status sosial ekonominya. Sebagaimana pendapat para ahli yang menyatakan bahwa sejumlah penelitian menemukan bahwa individu yang mempunyai tingkat pendidikan, pendapatan dan pekerjaan yang lebih bergengsi umumnya lebih berpartisipasi dibanding individu yang tidak berpendidikan, berpenghasilan rendah dan pekerja kasar, yang mana hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lipset dan Deustch dalam (Budiardjo, 2008:9) menunjukkan bahwa di Amerika Serikat dalam penelitiannya dengan kajian perilaku warga negara dalam pemilihan umum ditemukan suatu pola bahwa pendapatan, pendidikan dan status sosial merupakan faktor penting dalam proses partisipasi. Dengan kata lain tingkat pendapatan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, dan status sosial yang tinggi, cenderung mempengaruhi tingginya partisipasi politik masyarakat tersebut. Oleh

karena itu, banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Pontianak Selatan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008, adalah menarik untuk diteliti secara mendalam.

## 2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian pokok dari kegiatan penelitian, sehingga perumusannya perlu tegas dan jelas agar proses penelitian bisa benar-benar terarah dan terfokus ke permasalahan yang jelas. Adapun yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah, “Apakah terdapat pengaruh atau hubungan antara status sosial ekonomi terhadap rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008?”.

## 3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh atau hubungan antara status sosial ekonomi terhadap rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008. Serta untuk membuktikan kebenaran teori

dari beberapa ahli ilmuwan politik yg menyatakan bahwa status sosial ekonomi seseorang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik secara positif, dengan kenyataan di lapangan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Partisipasi Politik

Konsep partisipasi politik (*polytical participation*) secara singkat biasanya dipahami sebagai keikutsertaan warga negara dalam proses-proses politik secara sukarela (Pawito, 2009:222). Menurut McClosky dalam (Budiardjo, 1998:2) partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Sejalan dengan pendapat McClosky, Surbakti (dalam Rahman, 2002:128) mengartikan “partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan”. Sementara Menurut Budiardjo (2009:367) “partisipasi politik adalah kegiatan

seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)". Selanjutnya dalam sumber lain menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi, dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah (Hikmat 2004:55).

Istilah partisipasi seringkali digunakan untuk memberi kesan mengambil bagian dalam sebuah aktivitas. Mengambil bagian dalam sebuah aktivitas dapat mengandung pengertian ikut serta tanpa ikut menentukan bagaimana pelaksanaan aktivitas tersebut tetapi dapat juga berarti ikut serta dalam menentukan jalannya aktivitas tersebut, dalam artian ikut menentukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas tersebut. Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan yaitu: ada rasa sukarelaan (tanpa paksaan), ada keterlibatan secara emosional, dan memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya.

Selain itu para sarjana yang mengamati masyarakat demokrasi barat juga

cenderung berpendapat bahwa yang dinamakan partisipasi politik hanya terbatas pada kegiatan sukarela saja, yaitu kegiatan yang dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Akan tetapi, beberapa sarjana yang banyak mempelajari negara-negara komunis dan berbagai negara berkembang cenderung berpendapat bahwa kegiatan yang tidak sukarela pun tercakup, karena sukar sekali untuk membedakan antara kegiatan yang benar-benar sukarela dan kegiatan yang dipaksakan secara terselubung, baik oleh penguasa maupun oleh kelompok lain. Huntington dan Nelson membedakan partisipasi yaitu bersifat otonom (*autonomous participation*) dan partisipasi yang dimobilisasi (*mobilized participation*) atau dikerahkan oleh pihak lain (Budiardjo, 1998:370).

Dari beberapa penjelasan pengertian partisipasi politik di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam proses politik baik itu dalam kegiatan pemilihan maupun kegiatan lain yang erat hubungannya dengan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan politik.

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Dalam Buku Pengantar Sosiologi Politik, (Maran, 2007:156) Frank Linderfeld, menemukan bahwa faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya ia juga mengemukakan bahwa status sosial ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi dengan orang yang memiliki kemampuan ekonomi.

Sejalan dengan pendapat Frank Linderfeld, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lipset dan Deustch dalam (Budiardjo, 2008:9) menunjukkan bahwa di Amerika Serikat dalam penelitiannya dengan kajian perilaku warga negara dalam pemilihan umum ditemukan suatu pola bahwa pendapatan, pendidikan dan status sosial merupakan faktor penting dalam proses partisipasi. Dengan kata lain tingkat pendapatan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, dan status sosial yang tinggi, cenderung mempengaruhi tingginya partisipasi politik masyarakat tersebut.

Dalam konteks mikro, tingkat ekonomi masyarakat akan mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat

tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Huntington dan Nelson(1990:60) yang menyatakan bahwa terdapat korelasi antara pembangunan sosial dengan partisipasi politik, dan tingkat status sosial ekonomi masyarakat. Mereka yang berpendidikan lebih tinggi, berpenghasilan lebih besar, dan mempunyai status pekerjaan yang lebih tinggi biasanya lebih berpartisipasi daripada mereka yang miskin dan tidak berpendidikan. Selain itu ditegaskan juga oleh Surbakti (1997:144) yang mengungkapkan bahwa seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian politik, serta sikap dan kepercayaan kepada pemerintah. Sebaliknya masyarakat yang miskin dalam sumber-sumber ekonomi akan mengalami kesukaran untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakatnya yang akan menyebabkan timbulnya frustrasi dan keresahan yang pada gilirannya melumpuhkan demokrasi.

## 3. Hipotesis

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

(Ho) : Tidak ada pengaruh antara status sosial ekonomi terhadap rendahnya

tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008.

(Ha) : Ada pengaruh yang signifikan antara status sosial ekonomi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008.

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan model atau jenis penelitian korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah 67.929 orang yang tersebar di 5 Kelurahan yang ada di Kecamatan Pontianak Selatan. Sedangkan jumlah sampel yang diambil berdasarkan rumus penarikan sampel maka didapat sampel sebanyak 377 orang atau sebesar 0,55% dari jumlah populasi sebanyak 67.929 orang. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara acak (*random sampling*). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pontianak Selatan. Adapun variabel dalam penelitian ini ada 2 yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu status sosial ekonomi

masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan yang dilihat dari aspek tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan, kemudian variabel terikat dari penelitian ini yaitu tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan dalam pemilihan Walikota Pontianak tahun 2008. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni berupa komunikasi tidak langsung (kuesioner), wawancara dan studi dokumenter. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, analisis kualitatif, analisis tabel Silang, analisis korelasi product moment, dan analisis koefisien determinasi.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Hubungan Partisipasi Politik dan Status Sosial Ekonomi

Partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan dalam proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008 dapat dilihat dari keikutsertaan mereka dalam proses pemungutan suara yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner terhadap 377 responden. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa dari 377

responden yang datang ke TPS dan ikut mencoblos adalah sebanyak 215 orang atau sebesar 57,03% dan sisanya 162 orang atau sebesar 42,97% tidak ikut mencoblos. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan dalam memberikan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008 masih tergolong cukup rendah.

Sedangkan status sosial ekonomi responden di Kecamatan Pontianak Selatan berada dalam kategori status sosial ekonomi menengah keatas atau (tinggi) yakni dari 377 responden sebesar 75% atau sebanyak 284 responden berstatus sosial ekonomi tinggi, dan sisanya sebesar 25% atau sebanyak 93 responden berstatus sosial ekonomi menengah kebawah atau (rendah).

**Tabel 1**  
 Silang Status Sosial Ekonomi dan Partisipasi Politik Dalam Pilkada

Status Sosial Ekonomi	Partisipasi		Total
	Rendah	Tinggi	
Rendah	26 (28%)	67 (72%)	93 (100%)
Tinggi	136 (48%)	148 (52%)	284 (100%)
<b>Total</b>	162 (42%)	215 (58%)	377 (100%)

Sumber: Data diolah tahun 2014

Dari tabel silang di atas diketahui bahwa dari 284 responden yang status sosial ekonominya tinggi tingkat partisipasinya

sebesar 52% atau sebanyak 148 responden yang mengikuti kegiatan pemilihan, sedangkan mereka yang status sosial ekonominya rendah yakni dari 93 responden tingkat partisipasinya sebesar 72% atau sebanyak 67 responden yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Selanjutnya jika dianalisis lebih lanjut hasil dari tabel silang tersebut dapat disimpulkan bahwa responden yang status sosial ekonominya rendah lebih berpartisipasi yakni (72%:52%) dibanding yang status sosial ekonominya tinggi (48%:28%). Mereka yang partisipasinya tinggi cenderung berasal dari responden yang status sosial ekonominya rendah sebaliknya yang partisipasinya rendah cenderung berasal dari responden yang status sosial ekonominya tinggi. Dengan demikian dalam penelitian ini terdapat hubungan negatif antara status sosial ekonomi dan partisipasi politik dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008.

Dilihat dari hasil analisis tabel silang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara status sosial ekonomi responden terhadap tingkat partisipasi politik pada Pilkada Pontianak tahun 2008, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan

korelasi *product moment* untuk mencari pengaruh atau hubungan antara variabel bebas (X) status sosial ekonomi dengan variabel terikat (Y) partisipasi politik responden. Sebelum melakukan perhitungan, penulis terlebih dahulu telah membuat tabel persiapan perhitungan korelasi, yang berisikan jumlah skor dari masing-masing variabel yaitu variabel bebas (x) dan variabel terikat (y).

**Tabel 2**  
 Ringkasan Statistik Perhitungan Variabel Bebas (X) dengan Varabel Terikat (Y)

Simbol Statistik	Nilai Statistik
N	377
x	3663
y	2438
x <sup>2</sup>	41066
y <sup>2</sup>	21500
xy	23126

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N \sum x^2 - (\sum x)^2)(N \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

$$r_{xy} = \frac{(377)(23126) - (3663)(2438)}{\sqrt{[(377)(41066) - (3663)^2][(377)(21500) - (2438)^2]}}$$

$$r_{xy} = \frac{8718502 - 8930394}{\sqrt{(15481882 - 13417569)(8105500 - 5943844)}}$$

$$r_{xy} = \frac{-211892}{\sqrt{(2064313)(2161656)}}$$

$$r_{xy} = \frac{-211892}{\sqrt{4462334582328}}$$

$$r_{xy} = \frac{-211892}{2112423.864}$$

$$r_{xy} = -0.100$$

Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus pendekatan korelasi *product moment* secara keseluruhan, maka didapat hasil sebesar -

0.100. Artinya nilai  $r_{xy}$  hitung adalah -0.100. Apabila dilihat dari besarnya  $r_{xy}$  yang diperoleh maka interprestasinya yakni antara variabel X dan variabel Y tidak terdapat korelasi.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) maka dapat menggunakan pendekatan koefisien determinasi dari hasil perhitungan *korelasi product moment* di atas sebagai berikut  $KD = R^2 \times 100\%$ . Atau  $-0.100^2 \times 100\% = 1\%$ . Hal ini berarti status sosial ekonomi responden hanya memberikan kontribusi sebesar 1% terhadap partisipasi politik responden di Kecamatan Pontianak Selatan. Sedangkan sisanya sebesar 99% dipengaruhi oleh faktor lain.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat di jelaskan bahwa antara status sosial ekonomi memiliki korelasi atau pengaruh yang sangat lemah, kontribusinya hanya sebesar 1% saja terhadap partisipasi politik responden di Kecamatan Pontianak Selatan. Jika menurut pendapat Sodijono (2012) bahwa korelasi tersebut diabaikan sehingga dikatakan tidak ada pengaruh antara status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik responden di Kecamatan Pontianak Selatan dalam kegiatan pemilihan kepala daerah.

## 2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis ini dilakukan untuk lebih meyakinkan akan hasil akhir dari penelitian ini. Apakah terdapat pengaruh atau tidak antara status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik responden di Kecamatan Pontianak Selatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008?

Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencari *df* (*degree of freedom*) atau derajat kebebasan, dengan rumus  $df = N - nr$ . Responden yang diteliti sebanyak 377 orang dengan demikian  $N = 377$ . Variabel yang penulis cari korelasinya adalah variabel X dan Y, jadi  $nr = 2$ . Maka diperoleh derajat kebebasannya  $df = 377 - 2 = 375$ .

Setelah diketahui  $df = 375$  kemudian berkonsultasi pada tabel “r” *product moment* pada taraf signifikan 5% = 0.113. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima dan hipotesis nihil ( $H_o$ ) ditolak. Sebaliknya, jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak dan hipotesis nihil ( $H_o$ ) diterima.

Hasil perhitungan menyatakan bahwa nilai  $r_{hitung} = -0.100$  sedangkan nilai  $r_{tabel}$  yang tertera pada tabel “r” *product moment* pada taraf signifikan 5% adalah 0.113. Jadi kesimpulannya adalah pada taraf signifikan

5%  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , ( $-0.100 < 0.113$ ) atau  $r_{hitung}$  lebih kecil daripada  $r_{tabel}$ . Sehingga hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak dan hipotesis nihil ( $H_o$ ) diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik responden di Kecamatan Pontianak Selatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan pada Pemilihan Walikota Pontianak Tahun 2008”, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Status sosial ekonomi responden di Kecamatan Pontianak Selatan yang dilihat berdasarkan kombinasi atau penjumlahan skor dari masing-masing indikator status sosial ekonomi yakni tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan yang dimiliki responden maka diperoleh hasil dari 377 responden sebanyak 284 responden atau sebesar 75,33% berstatus sosial ekonomi menengah ke atas atau (tinggi). Sedangkan sisanya sebanyak

93 responden atau sebesar 24,67% berstatus sosial ekonomi menengah kebawah atau (rendah).

- 2) Tingkat Partisipasi politik responden di Kecamatan Pontianak Selatan yang dilihat berdasarkan penjumlahan skor dari setiap jawaban yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner maka diperoleh hasil dari 377 responden sebanyak 215 responden atau sebesar 57,03% menggunakan hak suaranya dalam kegiatan pemilihan kepala daerah Pontianak tahun 2008. Sedangkan sisanya sebanyak 162 responden atau sebesar 42,97% tidak menggunakan hak suaranya dalam kegiatan pemilihan kepala daerah Pontianak tahun 2008. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik responden di Kecamatan Pontianak Selatan termasuk dalam kategori rendah.
- 3) Secara umum, tidak terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik responden di Kecamatan Pontianak Selatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008. Hal ini terbukti dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

- a. Korelasi variabel X dengan variabel Y dengan hasil angka sebesar -0.100
- b. Koefisien determinasi dengan hasil angka sebesar 1%
- c. Sedangkan hasil uji hipotesis dengan berkonsultasi dengan tabel "r" product moment pada taraf signifikan 5% hasilnya rhitung < rtabel yaitu (-0.100 < 0.113). Dengan demikian hipotesis alternatif (Ha) ditolak, sedangkan Hipotesis nihil (Ho) diterima artinya tidak ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik responden di Kecamatan Pontianak Selatan dalam kegiatan pemilihan kepala daerah Pontianak tahun 2008. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi tertinggi terletak pada responden yang berstatus sosial ekonomi rendah, sedangkan partisipasi terendah terletak pada responden yang berstatus sosial ekonomi tinggi. Artinya semakin tinggi tingkat status sosial ekonomi responden, tidak menjamin tingkat partisipasinya akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya semakin rendah status sosial ekonomi

responden, tidak menjamin tingkat partisipasinya akan semakin rendah.

## 2. Implikasi Teoritik

Berdasarkan beberapa teori dari para ahli ilmuwan politik yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka pada penelitian ini yang diduga mempengaruhi partisipasi politik pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008 di Kecamatan Pontianak Selatan adalah status sosial ekonomi yang dilihat dari tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat penghasilan.

Hasil penelitian tentang variabel yang berpengaruh terhadap partisipasi politik, jika dikaitkan dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya berdasarkan pendapat Frank Linderfeld (dalam Maran, 2007:156) yang menyatakan bahwa faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya ia juga mengemukakan bahwa status sosial ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis, ternyata dalam penelitian ini tidak terbukti.

Kemudian berdasarkan pendapat Surbakti (1997:144) yang mengungkapkan bahwa seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian politik, serta sikap dan kepercayaan kepada pemerintah. Sebaliknya masyarakat yang miskin dalam sumber-sumber ekonomi akan mengalami kesukaran untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakatnya yang akan menyebabkan timbulnya frustrasi dan keresahan yang pada gilirannya melumpuhkan demokrasi, namun realitas di lapangan perkiraan tersebut dalam penelitian ini tidak terbukti.

Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lipset dan Deustch dalam (Budiardjo, 2008:9) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, dan status sosial yang tinggi, cenderung mempengaruhi tingginya partisipasi politik masyarakat, namun pada kenyataan di lapangan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh yang signifikan antara status sosial ekonomi terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat. Dengan kata lain hasil penelitian tersebut tidak berlaku di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa

partisipasi politik tertinggi terdapat pada responden yang berstatus sosial ekonomi rendah. Mereka yang berpendidikan rendah, berpenghasilan rendah serta berstatus pekerjaan sebagai buruh dan petani justru lebih berpartisipasi daripada mereka yang berpendidikan tinggi, berpenghasilan tinggi dan berstatus pekerjaan sebagai Pengusaha, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan wiraswasta.

Dengan demikian yang sesuai dengan hasil penelitian di Kecamatan Pontianak Selatan adalah pendapat Huntington dan Nelson (1990: 111) yang menunjukkan bahwa orang-orang yang berpendidikan tinggi kurang berminat untuk melibatkan diri dalam kegiatan pemilihan, termasuk memberikan suara. Tingkat-tingkat partisipasi pemilihan yang paling tinggi terdapat dikalangan orang-orang yang buta huruf, lalu orang-orang yang berpendidikan menengah, sedangkan orang-orang yang berpendidikan tinggi menunjukkan tingkat-tingkat partisipasi yang paling rendah. Orang-orang yang berpendidikan rendah menganggap bahwa hari pemilihan adalah sebagai hari pesta sehingga mereka sangat antusias mengikutinya. Namun pendapat Huntington dan Nelson tersebut tidak serta merta mewakili secara keseluruhan aspek atau indikator status sosial ekonomi, yang mana telah kita ketahui bahwa status sosial

ekonomi seseorang tidak dapat hanya dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya saja, melainkan dilihat berdasarkan tiga aspek yakni tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan status pekerjaan. Ditinjau dari aspek tingkat penghasilan dan status pekerjaan pendapat Huntington dan Nelson pada penelitian ini juga tidak terbukti. Dalam penelitian ini responden yang memiliki tingkat pendapatan rendah dan berstatus pekerjaan sebagai buruh dan petani justru memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan responden yang berpenghasilan tinggi dan berstatus pekerjaan sebagai Pengusaha, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan wiraswasta.

### 3. Saran

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian ini, ada tiga faktor yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan yakni faktor kesibukan sehari-hari, faktor popularitas calon, faktor hilangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang diakibatkan oleh segelintir oknum pejabat pemerintah yang tidak amanah dan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyatnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya penurunan angka partisipasi politik masyarakat, maka perlu adanya upaya efektivitas pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan. Untuk itu dalam hal ini peran dari partai politik sangatlah penting untuk memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan. Karena salah satu fungsi dari partai politik adalah memberikan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Partai politik harus secara terstruktur memberikan edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan cara pendekatan-pendekatan langsung ataupun melalui penyuluhan-penyuluhan agar masyarakat mengerti dan memahami akan pentingnya peranan mereka dalam berpartisipasi politik dalam setiap kegiatan pemilihan, sehingga kedepannya fenomena penurunan tingkat partisipasi masyarakat tidak terulang kembali pada kegiatan pemilihan berikutnya.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

Budiardjo, Miriam. Prof. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

\_\_\_\_\_. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Hikmat, Harry. 2004. *Pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Cipruy

Huntington, Samuel P. Dan Joan Nelson. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta.

Madjid, Nurcholis. 2009. *Cita-cita Politik Islam*. Jakarta; Paramadina

Maran, Rafael Raga. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta

Pawito, 2009. *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta, (unpublished).

Rahman, Arifin. 2002. *SITEM POLITIK INDONESIA: Dalam Perspektif Struktural Fungsional*. Surabaya : SIC

Surbakti, Ramlan. 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tim Pustaka Art. 2007. *Undang-Undang Otonomi Daerah (Terbaru)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Waristo, Teguh Wuyono. 2003. *OTONOMI DAERAH: Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lokal*. Semarang: PUSKODAK UNDIP.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Ahmad Fauzi  
 NIM / Periode lulus : E02109011 / 2015  
 Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi  
 E-mail address/HP : fauzi.achmad80@yahoo.com / 089671141911

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....\*) pada Program Studi.....Ilmu Politik..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul \*\*):

Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Pontianak  
 Selatan pada Pemilihan Walikota Pontianak Tahun 2008

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/disetujui  
 Pengelola Jurnal .....

Tore Bahriyaningel  
 NIP. 19460412200212102

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal: 28 Mei 2015.

Ahmad Fauzi  
 ( Ahmad Fauzi )  
 nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing*

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).